

**PENGARUH KOMUNIKASI TENTANG IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
OLEH KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (KPPT) TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGURUSAN PEMBUATAN
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KOTA CIREBON**

Oleh :

Didi Saputra
Heriyani Agustina
Mukarto Siswoyo

Abstract

Research by the author is the influence of communication on building permit (IMB) by unified licensing offices (KPPT) for community participation in the management of the manufacture of building permit (IMB) in the city of Cirebon. The problem is that the writer suggested participation in the manufacture of building permit (IMB) in the city of Cirebon less than optimal, the problem is suspected in non optimal result from the implementation of the communication by the unified licensing offices (KPPT) Cirebon. The research question ajuakan writer is, is there any influence by the office of the communication services integrated permitting (KPPT) for community participation in the management of manufacturing IMB The method I used is quantitative (survey) The hypothesis that the authors propose is as follows. "There is a positive and significant correlation between communication by KPPT Cirebon terhadap community participation in the management of the manufacture of building permit (IMB) in the city of Cirebon". From the hypothesis can be formulated statistical hypothesis as follows:

Ho (Null Hypothesis): rs count <of rs table, then the formulation of the problem is: "There is no positive and significant impact on the communication between the effect of building permit (IMB) by unified licensing offices (KPPT) on public participation in the management of the manufacture of building permit (IMB) in the city of Cirebon. Ha (Alternative Hypothesis): count rs> rs of the table, then the formulation of the problem is: "There is a positive and significant correlation between the influence of communication on building permit (IMB) by unified licensing offices (KPPT) for community participation in the management of the manufacture of building permit (IMB) in the city of Cirebon.".

In this study obtained results that the communication made by KPPT good enough sufficient, but not optimal segaimana seen from the successful implementation of the communication reached 62.0% with a total score of 3019, while the participation of the community has been pretty good but not optimal, as the percentage is 60.9 % with a total score of 3702 Implementation of the communication by the close KPPT have an influence on public participation in the management of the manufacture of building permit (IMB) in the city of Cirebon. calculate the value of rs rs tables 0.220 0.642 sedangkan. Since rs rs count is greater than the table, then there is a positive and significant correlation between communication by KPPT influence people's participation in the management of the manufacture of building permit (IMB) in the city of Cirebon. Thus, the authors propose a hypothesis that can be tested and accepted.

A. PENDAHULUAN

A.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah Daerah adalah pelaksana pembangunan daerah dengan pelayanan masyarakat sebagai pengganti pemerintah pusat. Dan diatur dalam Undang-Undang republik indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan umum atau publik

Pelayanan umum atau publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan umum atau publik.

Kota Cirebon adalah salah satu pemerintah daerah yang berada di wilayah Jawa Barat. Di kota Cirebon terdapat lembaga yang menangani perijinan adalah (KPPT) kantor pelayanan per ijinan terpadu.

Adapun masalah pembangunan di kota Cirebon masih banyak masyarakat yang tidak tahu pentingnya ijin mendirikan bangunan (IMB) karena terbukti masih banyak bangunan-bangunan yang tidak memiliki ijin dan masih banyak bangunan yang berdiri di atas fasilitas umum seperti terotoar dan daerah penghijauan kota

Untuk itu pemerintah kota Cirebon pada tahun 2009 membentuk Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) kota Cirebon, pembentukan tersebut merupakan kebijakan yang sangat strategis, agar proses pelayanan perijinan di kota Cirebon bersifat paripurna, dengan ciri utama bahwa keseluruhan proses pelayanan perijinan dari mulai awal pengajuan permohonan, proses pengkajian, penilaian persyaratan administrasi dan teknis sampai dengan penandatanganan dan penyerahan dokumen ijin dilakukan di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) kota Cirebon, tidak lagi berada diberbagai instansi. Hal inilah yang

membedakan dengan pelayanan perijinan sebelum tahun 2009

Berdasarkan pengamatan yang dilaksanakan oleh penulis pada kantor pelayanan perijinan terpadu (KPPT) kota Cirebon di dapat keterangan, bahwa masih banyak bangunan- bangunan di kota Cirebon yang belum memiliki ijin (IMB). Hal tersebut terlihat pada hal-hal sebagai berikut :

1. Masih adanya masyarakat yang kurang mengerti mengenai manfaat dari ijin mendirikan bangunan (IMB) tersebut, sehingga mengakibatkan kurangnya kesadaran untuk berpartisipasi.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perijinan yang berlaku, menimbulkan rendahnya partisipasi masyarakat sehingga mengakibatkan rencana program pemerintah daerah tentang tata kota belum tercapai.
3. Kurangnya komunikasi yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terutama kantor pelayanan perijinan terpadu (KPPT), sehingga menyebabkan tidak optimalnya partisipasi masyarakat untuk pembangunan.

Masalah tersebut diduga timbul akibat kurang optimalnya pelaksanaan komunikasi yang tepat oleh kantor pelayanan perijinan terpadu menyebabkan masih rendahnya partisipasi masyarakat, hal ini dapat dilihat dari :

1. Ketidaktahuan masyarakat tentang peraturan daerah mengenai Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
2. Masyarakat belum mengetahui tentang manfaat pentingnya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) .
3. Masyarakat belum memahami betul peraturan daerah tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Berdasarkan masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang hasilnya dituangkan dalam rangka peyusunan skripsi dengan judul :

“Pengaruh Komunikasi Tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pengurusan Pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kota Cirebon”.

A.2 Rumusan Masalah

“Partisipasi masyarakat dalam pembuatan ijin mendirikan bangunan (IMB) belum optimal, hal tersebut diduga disebabkan akibat belum maksimalnya komunikasi tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilakukan oleh kantor pelayanan perijinan terpadu (KPPT) kota Cirebon “.

A.3 Identifikasi Masalah

- 1) Bagaimana komunikasi tentang IMB yang dijalankan oleh kantor pelayanan perijinan terpadu (KPPT) dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengurusan pembuatan ijin mendirikan bangunan (IMB) di kota Cirebon ?
- 2) Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengurusan pembuatan ijin mendirikan bangunan ?
- 3) Sejauhmana pengaruh komunikasi tentang ijin mendirikan bangunan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengurusan pembuatan ijin mendirikan bangunan (IMB)?
- 4) Hambatan-hambatan apa yang ditemui oleh kantor pelayanan perijinan terpadu (KPPT) dalam rangka komunikasi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurusan pembuatan ijin mendirikan bangunan (IMB) ?

A.4. Tujuan Penelitian

- 1) Mengetahui pelaksanaan komunikasi tentang IMB untuk upaya mencapai pelaksanaan program tertib Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di kota Cirebon

- 2) Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pengurusan pembuatan ijin mendirikan bangunan (IMB) di kota Cirebon .
- 3) Mengetahui sejauhmana pengaruh komunikasi tentang ijin mendirikan bangunan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengurusan pembuatan ijin mendirikan bangunan (IMB).
- 4) Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kantor pelayanan perijinan terpadu (KPPT) dalam pelaksanaan komunikasi tentang IMB terhadap partisipasi masyarakat dalam pengurusan pembuatan ijin mendirikan bangunan (IMB) di kota Cirebon .

A.5. Kegunaan Penelitian

- 1) Untuk mengevaluasi dan memperbaiki dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengurusan pembuatan ijin mendirikan bangunan (IMB).
- 2) Untuk mengetahui program-program apa saja yang sudah, belum, dan akan dilaksanakan.
- 3) Memberikan sosialisasi yang jelas mengenai ijin mendirikan bangunan (IMB).
- 4) Sebagai bahan masukan bagi pemerintah setempat untuk meningkatkan komunikasi tentang ijin mendirikan bangunan terhadap partisipasi masyarakat.
- 5) Memperkaya khasanah keilmuan dan literatur dalam bidang komunikasi tentang IMB terhadap partisipasi masyarakat dalam IMB di kota Cirebon .
- 6) Memberikan tambahan informasi bagi mahasiswa khususnya mengenai bahasan tentang komunikasi tentang IMB terhadap partisipasi masyarakat di kota Cirebon.
- 7) Menambah ilmu dan pengetahuan khususnya bagi penyusun tentang partisipasi masyarakat terhadap

peroses ijin mendirikan bangunan (IMB) dan mengetahui dampak-dampaknya.

A.6. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mendukung proses pembentukan karakter suatu organisasi dan Pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan anggapan dasar tersebut maka selanjutnya penyusun mengemukakan hipotesis-hipotesis sebagai berikut: “Ada pengaruh yang signifikan dan positif dari komunikasi tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap partisipasi masyarakat dalam pengurusan pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di kota Cirebon ”.

A.7 Metode penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah survey, sebagaimana yang dikemukakan Karlinger dalam Sugiyono (2008:7) yaitu sebagai berikut:

Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang di pelajari data dari sampel yang di ambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antara variabel, sosiologis, maupun psikologis.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan
2. Studi Lapangan, terdiri dari :
 - a) Observasi
 - b) Wawancara
 - c) Angket

Populasi dan Sampel

Populasi yang diteliti ada dua macam yaitu populasi pegawai KPPT dan populasi masyarakat yang berkepentingan dalam pengurusan IMB.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait langsung dengan pengaruh komunikasi tentang IMB terhadap partisipasi masyarakat dalam pengurusan pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) , yaitu :

1. Pegawai Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Cirebon : 29 orang
2. masyarakat yang berkepentingan dalam pengurusan IMB : 60 orang

1.7.1. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis kuantitatif, yaitu analisa variabel penelitian dengan menggunakan rumus statistik sebagai pengolahan datanya. Variabel yang dianalisis adalah variabel Komunikasi dan varibel partisipasi masyarakat dalam pembuatan pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan didukung oleh data yang penyusun ambil dari pendapat responden dengan cara menyebarkan angket jenis tertutup kepada responden, sebelum angket digunakan terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

B.1. Pengertian Komunikasi

Komunikasi merupakan fungsi manajemen yang sangat penting peranannya untuk mendukung proses pembentukan karakter suatu organisasi dan pencapaian tujuan organisasi. Komunikasi merupakan alat satu-satunya untuk mentransfer ide-ide, gagasan –gagasan, nilai-nilai, sumbangsi pemikiran, saran-saran dari anggota organisasi dan motivasi para anggota organisasi. Sehingga dengan komunikasi terdapat persamaan persepsi atau maksud antara komunikator dan komunikan. Dengan adanya persamaan maksud atau persamaan makna dari kedua belah pihak, komunikasi dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

B.2 Pengertian Masyarakat

Sebagaimana diungkapkan oleh Paul B. Horton dan C. Hunt (ridwan dan Elly, 2007: 46) bahwa

masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal disuatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan didalam kelompok atau kumpulan manusia tersebut.

B.3 Pengaruh komunikasi terhadap partisipasi masyarakat

Komunikasi merupakan hal yang penting dalam suatu kehidupan organisasi maupun bermasyarakat. Dengan adanya komunikasi dapat membina hubungan kerja sama antara para anggota organisasi dan masyarakat sekitar. Dengan pelaksanaan komunikasi yang baik dapat membina suatu hubungan kerjasama yang harmonis antara masyarakat dengan anggota organisasi. Hal ini akan memberikan suatu kepuasan batin bagi setiap anggota masyarakat dalam organisasi yang mana dengan sendirinya akan tumbuh semangat dan gairah untuk bekerja sama dalam suatu kepentingan bersama.

C. OBYEK PENELITIAN

C.1. Demografi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Cirebon dibentuk dengan berlakunya peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 23 Juli 2007 dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon nomor 15 tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi pamong Praja dan Kantor Pelayanan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon yang mempunyai kedudukan sebagai berikut :

Berdasarkan peraturan walikota Cirebon Nomor 57 tahun 2008, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Cirebon, memiliki tugas pokok melaksanakan urusan

pemerintahan daerah dalam melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

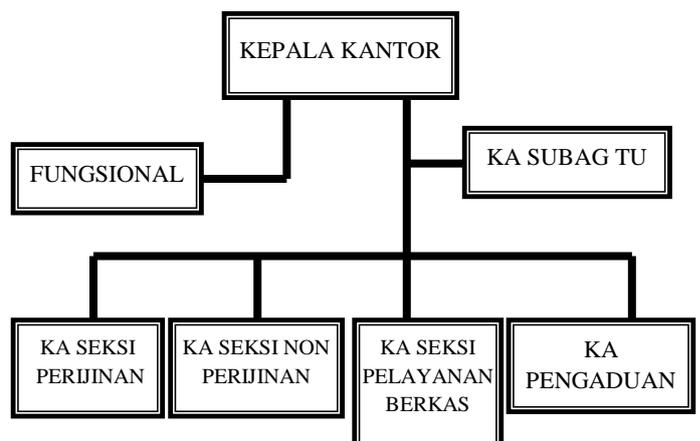
Sedangkan fungsinya sebagaimana dijelaskan dalam peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2008, adalah :

- Pelaksanaan penyusunan program kantor.
- Penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan dan non perijinan.
- Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan dan non perijinan.
- Pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan dan non perijinan.
- Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan dan non perijinan.

C.2. Bagan struktur organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Kota Cirebon adalah sebagai berikut :

Gambar 1

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Cirebon



Sumber: kantor pelayanan perijinan Kota Cirebon, tahun 2012

C.3. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor Pelayanan Perijinan Kota Cirebon

1. **Pimpinan**, adalah kepala kantor, yang memiliki tugas pokok dan fungsi.

Tugas pokok :

Mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, mengarahkan, membina, mengendalikan, menandatangani, mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perijinan dan non perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian berdasarkan kebijakan walikota dan atau sekretaris daerah serata tugas pembantuan yang ditugaskan pemerintah pusat kepada pemerintah kota.

2. **Sub Bag Tata Usaha** adalah sebagai unsur staf atau administrasi yang memiliki tugas pokok dan fungsi.

Tugas pokok :

Memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan merencanakan kegiatan urusan unsur keorganisasian dan keuangan dalam rangka mendukung mekanisme kerja kantor.

3. **Seksi perijinan** adalah sebagai pembantu unsur pelaksanaan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi.

Tugas pokok :

Memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi, dan merencanakan kegiatan operasional urusan mengkoordinasikan tim teknis dalam memberikan saran, pertimbangan mengenai diterima atau ditolak dan memproses suatu permohonan perijinan.

4. **Seksi Non Perijinan** adalah sebagai pembantu unsur pelaksanaan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi

Tugas pokok :

Memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi, dan merencanakan kegiatan operasional urusan mengkoordinasikan tim teknis dalam memberikan saran pertimbangan mengenai diterima atau ditolak dan memproses suatu permohonan non perijinan.

5. **Seksi Pelayanan Berkas Perijinan** adalah sebagai pembantu unsur pelaksanaan yang memiliki tugas pokok dan fungsi.

Tugas pokok :

Memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan merencanakan kegiatan operasional urusan penerimaan, penyerahan dan mengarsipkan berkas pelayanan perijinan dan non perijinan.

6. **Seksi Pengaduan** adalah sebagai pembantu unsur pelaksanaan yang memiliki tugas pokok dan fungsi

Tugas pokok :

Memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan merencanakan kegiatan operasional urusan penerimaan dan pengolahan pengaduan masyarakat.

C.4 Jenis-Jenis Pelayanan Perijinan di KPPT Kota Cirebon

Berdasarkan peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (DPJMD) Kota Cirebon Tahun 2008 – 2013 dan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 503/Kep.128-Ortala/2009 tentang Penetapan Jenis-Jenis Pelayanan Perijinan pada kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Cirebon dilakukan secara bertahap dan untuk tahun 2009 Pelayanan Perijinan Yang sudah di delegasikan pada KPPT Kota Cirebon adalah :

1. Ijin Undang-Undang Gangguan (HO).
2. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
4. Ijin Usaha Industri (IUI).
5. Surat Ijin Usaha Pariwisata (SIUK).
6. Fatwa Rencana Pengarah Lokasi (FRPL).
7. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
8. Ijin Reklame.
9. Ijin Angkutan Trayek Umum.
10. Ijin Parkir Umum di Luar Badan Jalan.

C.5. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Perijinan Kota Cirebon

Sebagaimana hal di atas, KPPT dalam merumuskan visinya melibatkan seluruh personil yang ada dengan tetap memperhatikan peran *stake holders* lainnya sebagai pilar pemerintahan.

Adapun misi yang disusun KPPT adalah :

1. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparatur secara berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan perijinan dengan menyiapkan perangkat keras dan lunak secara bertahap.
3. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi dengan instansi terkait.
4. Melakukan kajian-kajian strategis di bidang kebijakan perijinan dan non perijinan.

D. PEMBAHASAN

D.1. Hasil Pengujian Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diambil dari indikator variabel. Dalam hal ini angket yang digunakan untuk mencari data yang berisi tentang indikator komunikasi dan indikator partisipasi masyarakat dalam pengurusan pembuatan ijin mendirikan bangunan (IMB). Sebaik-baiknya penelitian jika pengumpulan data (peyebaran angketnya) dilaksanakan dengan menggunakan instrument penelitian yang valid dan reliabel. Untuk dapatkan angket

(sebagai instrument penelitian) yang valid dan reliabel harus dilakukan pengujian. Pengujian dilakukan dengan cara menyebarkan semua item pertanyaan/pernyataan di dalam angket ke responden.

Pengujian validitas adalah pengujian terhadap instrumen penelitian untuk mengetahui keabsahan item – item pertanyaan yang akan disusun dalam angket. Pengujian validitas dilakukan dengan cara mencobakan seluruh item pertanyaan yang dituangkan dalam angket, kemudian angket tersebut disebarkan kepada 81 orang responden yang terdiri 29 pegawai KPPT dan 52 masyarakat.

Untuk mengukur tingkat komunikasi oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Cirebon, penulis menggunakan angket (instrumen penelitian) yang merupakan penjabaran dari prinsip – prinsip komunikasi menurut handyaningrat (2001: 101).

Untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam pengurusan pembuatan ijin IMB di kota Cirebon, penulis menggunakan angket (instrumen penelitian) yang merupakan penjabaran dari unsur-unsur penting partisipasi Menurut santoso sastropoetro (1988:22).

D.2 Pembahasan Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pengurusan Pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Cirebon

Sesuai dengan anggapan dasar yang telah dikemukakan sebelumnya, secara jelas telah diuraikan bahwa dalam menganalisa variabel partisipasi masyarakat dalam pengurusan pembuatan IMB di Kota Cirebon dilakukan dengan cara menelaah indikator – indikator partisipasi masyarakat melalui penerapan unsur - unsur partisipasi masyarakat oleh Santoso Sastroputro (1988 : 41) sebagai berikut :

1. komunikasi yang membutuhkan pengertian yang efektif atau berhasil.
2. Perubahan sikap, pendapat dan tingkah laku yang diakibatkan oleh pengertian yang menumbuhkan kesadaran.

3. Kesadaran yang didasarkan pada perhitungan dan pertimbangan.
4. Enthousiasme yang menumbuhkan spontanitas, yaitu kesediaan melakukan sesuatu yang tumbuh dari dalam lubuk hati sendiri tanpa dipaksa orang lain.
5. Adanya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bersama.

D.3 Hambatan – Hambatan yang Dihadapi oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Cirebon

- Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Cirebon kurang mempunyai waktu yang leluasa karena kesibukannya dalam melakukan pekerjaan yang lain dan jumlah pegawai yang sedikit. Sehingga hal tersebut menghambat proses pelaksanaan komunikasi terhadap partisipasi masyarakat di dalam pengurusan pembuatan IMB di Kota Cirebon.
- Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Cirebon tidak mempunyai cukup dana untuk memberikan komunikasi yang lebih dalam bentuk famplet dan iklan didalam mensosialisasikan IMB sehingga menimbulkan ketidak tahuan masyarakat untuk berpartisipasi.
- Kurang baiknya feedback dari masyarakat, dikarenakan tingkat pendidikan, ekonomi dan budaya, sikap masyarakat yang tidak baik seperti saat sosialisasi IMB masyarakat banyak tidak memperhatikan apa yang disampaikan, kondisi tersebut diperburuk dengan tidak mengerti dan tidak faham tentang penggunaan bahasa dalam komunikasi pada saat sosialisasi.

E. SIMPULAN DAN SARAN

E.1 Simpulan

1. Pelaksanaan komunikasi oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Cirebon belum optimal sebagaimana mestinya. Ini terlihat dari tingkat presentase keberhasilan

pelaksanaan komunikasi yang dilakukan oleh KPPT Kota Cirebon yaitu sebesar **62 %** dengan total skor sebesar **3019** atau berada pada interval kadang – kadang. Secara kualitas pelaksanaan komunikasi sudah berdasarkan pada prinsip – prinsip komunikasi namun belum optimal dan masih perlu ditingkatkan.

2. Partisipasi masyarakat yang tercipta di dalam pengurusan pembuatan ijin mendirikan bangunan (IMB) di Kota Cirebon belum optimal sebagaimana mestinya. Ini terlihat dari tingkat presentase keberhasilan pelaksanaan partisipasi masyarakat di dalam pengurusan pembuatan ijin mendirikan bangunan (IMB) di Kota Cirebon yaitu sebesar **60,9 %** dengan total skor sebesar **3702** atau berada pada interval kadang – kadang. Secara kualitas partisipasi masyarakat yang ada sudah tercipta berdasarkan pada unsur – unsur partisipasi masyarakat namun belum optimal dan masih perlu ditingkatkan.
3. Pengaruh komunikasi tentang ijin mendirikan bangunan (IMB) oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Cirebon terhadap partisipasi masyarakat dalam pengurusan pembuatan IMB di Kota Cirebon berdasarkan koefisien korelasi (r_s hitung) diperoleh sebesar 0,642 adalah lebih besar daripada 0 dan berarti korelasinya positif dan kuat, dengan kata lain terdapat hubungan yang kuat. Adapun besarnya pengaruh atau Koefisien Determinan (KD) adalah sebesar 41,2%.
4. Hambatan – hambatan yang ditemui oleh KPPT Kota Cirebon dalam melaksanakan komunikasi guna meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pengurusan pembuatan ijin mendirikan bangunan (IMB) di Kota Cirebon adalah :
 - Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Cirebon kurang mempunyai waktu yang leluasa

karena kesibukannya dalam melakukan pekerjaan yang lain dan jumlah pegawai yang sedikit. Sehingga hal tersebut menghambat proses pelaksanaan komunikasi terhadap partisipasi masyarakat di dalam pengurusan pembuatan IMB di Kota Cirebon.

- Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Cirebon tidak mempunyai cukup dana untuk memberikan komunikasi yang lebih dalam bentuk famplet dan iklan didalam mensosialisasikan IMB sehingga menimbulkan ketidaktahuan masyarakat untuk berpartisipasi.
- Kurang baiknya feedback dari masyarakat, dikarenakan tingkat pendidikan, ekonomi dan budaya, sikap masyarakat yang tidak baik seperti saat sosialisasi IMB masyarakat banyak tidak memperhatikan apa yang disampaikan, kondisi tersebut diperburuk dengan tidak mengerti dan tidak faham tentang penggunaan bahasa dalam komunikasi pada saat sosialisasi.

E.2 Saran

1. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Cirebon hendaknya semakin memperdalam prinsip – prinsip komunikasi yang ada guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurusan pembuatan ijin mendirikan bangunan di Kota Cirebon. Semua itu terlihat dari tabel pelaksanaan perdimensi variabel komunikasi yang menjelaskan bahwa “prinsip kejelasan berarti komunikasi yang jelas dan tepat dalam penggunaan bahasa serta memperhatikan latar belakang pendidikan penerima pesan.” memiliki skor terendah dibandingkan dimensi yang lain, sehingga hendaknya KPPT Kota Cirebon memahami dan dapat mengerti apa yang diinginkan masyarakat.

2. Unsur – unsur partisipasi masyarakat yang ada sebaiknya semakin ditingkat guna menciptakan partisipasi masyarakat yang optimal dalam pengurusan pembuatan IMB di Kota Cirebon.
3. Pengaruh komunikasi tentang ijin mendirikan bangunan (IMB) oleh kantor pelayanan perijinan terpadu (KPPT) terhadap partisipasi masyarakat dalam pengurusan pembuatan ijin mendirikan bangunan (IMB) di kota cirebon memiliki kekuatan pengaruh yang kuat.. Akan tetapi KPPT haruslah menjaga dan terus mennciptakan komunikasi yang optimal terhadap partisipasi masyarakat dalam pengurusan pembuatan ijin mendirikan bangunan (IMB) di kota cirebon.
4. Untuk mengatasi hambatan – hambatan yang ada, penulis memberikan saran – saran sebagai berikut :
 - Untuk mengatasi kesibukan KPPT Kota Cirebon yang senantiasa menghambat pelaksanaan komunikasi, disarankan untuk dilakukannya pertemuan dengan masyarakat. Sehingga pelaksanaan partisipasi dapat tercapai secara maksimal.
 - Untuk mengatasi masalah kurangnya dana untuk memberikan komunikasi yang lebih dalam bentuk famplet dan iklan, disarankan untuk dilakukan inventarisasi beberapa pemasukan dana yang mungkin dapat dijadikan modal untuk pembuatan.
 - KPPT harus bisa memahami apa yang harus dilakukan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dikarenakan tingkat pendidikan, ekonomi dan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku Panduan., 2010. *Bagi Pelaku Usaha Atau Bisnis dan Masyarakat Dalam Pengurusan Ijin*. KPPT Kota Cirebon
- Bungin, Burhan., 2008. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta : PT. Kencana Prenada Media Group.
- Effendy, Onong, Uchyana., 1995. *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek*. Bandung : CV. Remaja Karya.
- Gunawan, Ary H., 2010. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Hamijoyo, Santoso s., 2005. *Komunikasi Partisipatoris* .Bandung : HUMANIORA
- Handayani, Soewarno., 1996. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : CV. Gunung Agung.
- Rahmat, Jalaludin., 2005. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Sastropetro, Santoso. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung : Alumni.
- Siegel, Sidney., 1992. *Statistik Nonparametrik Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Sugiyono., 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Siegel, S., 2000. *Statistik Nonparametrik Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta : PT Gramedia
- _____, 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta. CV. Haji Masagung.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
A. PENDAHULUAN	
A.1 Latar Belakang Penelitian	1
A.2 Rumusan Masalah.....	3
A.3 Identifikasi Masalah.....	3
A.4 Tujuan Penelitian.....	4
A.5 Kegunaan Penelitian	4
A.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis	5
A.7 Metode penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	6
B. TINJAUAN PUSTAKA	
B.1. Pengertian Komunikasi	7
B.2 Pengertian Masyarakat	8
B.3 Pengaruh komunikasi terhadap partisipasi masyarakat.....	8
C. OBYEK PENELITIAN	
C.1. Demografi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.....	9
C.2. Bagan struktur organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Kota Cirebon adalah sebagai berikut	10
C.3. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor Pelayanan Perijinan Kota Cirebon	12
C.4 Jenis-Jenis Pelayanan Perijinan di KPPT Kota Cirebon	12
C.5. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Perijinan Kota Cirebon.....	13
D. PEMBAHASAN	
D.1. Hasil Pengujian Instrumen Penelitian	14
D.2 Pembahasan Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pengurusan Pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Cirebon.....	15
D.3 Hambatan – Hambatan yang Dihadapi oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Cirebon	16
E. SIMPULAN DAN SARAN	
E.1 Simpulan.....	17
E.2 Saran	19

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Buku Panduan., 2010. *Bagi Pelaku Usaha Atau Bisnis dan Masyarakat Dalam Pengurusan Ijin*. KPPT Kota Cirebon
- Bungin, Burhan., 2008. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta : PT. Kencana Prenada Media Group.
- Effendy, Onong, Uchyana., 1995. *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek*. Bandung : CV. Remaja Karya.
- Gunawan, Ary H., 2010. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Hamijoyo, Santoso s., 2005. *Komunikasi Partisipatoris*. Bandung : HUMANIORA
- Handayaniingrat, Soewarno., 1996. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : CV. Gunung Agung.
- Rahmat, Jalaludin., 2005. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Sastropoetro, Santoso. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung : Alumni.
- Siegel, Sidney., 1992. *Statistik Nonparametrik Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Sugiyono., 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Siegel, S., 2000. *Statistik Nonparametrik Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta : PT Gramedia
- _____, 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta. CV. Haji Masagung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang *pelayanan umum dan publik*.
- Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang *Pokok-pokok Kepegawaian*.
- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang *rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Cirebon tahun 2008/2013*.
- Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 13 Tahun 2008 tentang *Lembaga Teknis Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Cirebon*.
- Peraturan WaliKota Cirebon Nomor 57 Tahun 2008 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Cirebon*.
- Peraturan WaliKota Cirebon Nomor 15 Tahun 2009 tentang *standar dan mekanisme Kerja Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Cirebon*
- Keputusan WaliKota Cirebon Nomor 503/Kep.128-Ortala/2009 tentang *penetapan jenis-jenis pelayanan perijinan pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Cirebon*.